

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkah dan limpahan rahmat-Nya sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo tahun 2001 - 2006 dapat tersusun.

Tak terasa kita telah memasuki tahun 2006 yang merupakan tahun keenam dalam perjalanan daerah ini. Ibarat anak kecil (*immature*), daerah ini sedang berproses menuju fase dewasa (*mature*). Tentu saja hasil pembangunan secara optimal belum bisa diharapkan pada masa-masa seperti ini. Namun dengan tetap bekerja sambil terus belajar (*learning by doing*), kita dapat melewati masa tahun keenam di tahun 2006.

Pedoman penyelenggaraan pemerintahan daerah telah bergeser secara signifikan, melalui pemberlakuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah cukup mendasar pada sistem pemerintahan daerah, dimulai dari sistem pemilihan kepala daerah, mekanisme pertanggungjawaban kepala daerah, pola pembagian urusan secara proporsional antar tingkatan pemerintahan, sistem perencanaan pembangunan daerah, kepegawaian hingga pembinaan, dan pengawasan pemerintahan daerah. Keseluruhannya, mendorong interaksi manajemen pemerintahan daerah antara pemerintah daerah dengan DPRD menjadi kian profesional, dengan kontrol politik yang lebih dewasa.

Dalam konteks rekonstruksi penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, hal yang perlu dicermati ialah berkaitan dengan hubungan akuntabilitas manajemen pemerintahan daerah, dari pendekatan akuntabilitas horisontal kepada akuntabilitas vertikal. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 27 (ayat 2), telah mengubah pola pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, menjadi kepada Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri. Sedangkan kepada masyarakat, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dilakukan

melalui berbagai media informasi yang memungkinkan akses seluas-luasnya bagi masyarakat. Perubahan tersebut, merupakan implikasi dari amandemen Undang-undang Dasar 1945 yang berdampak pada perubahan sistem pemerintahan daerah. Sementara itu, dalam perspektif amanah dan substansi pemerintahan, penyampaian **progress** kinerja pemerintahan kepada DPRD, merupakan refleksi dari nilai-nilai demokrasi yang diwujudkan pada DPRD, sebagai mitra kerja pemerintah daerah yang mengemban fungsi lembaga wakil rakyat.

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, mekanisme laporan keterangan pertanggungjawaban tahunan kepala daerah (LKPJ), merupakan *progress report* dan wahana untuk saling berbagi peran dalam menganalisis kondisi kinerja pemerintahan daerah, yang telah dilakukan sepanjang tahun berjalan. Hal tersebut akan semakin mendorong tumbuhnya semangat obyektivitas, dalam memotret kinerja pemerintahan daerah, yang dilandasi kemitraan, untuk saling melengkapi dalam menterjemahkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat menuju perwujudan dan pencapaian *Good Local Governance*.

Implementasi terhadap amanat diatas, substansi laporan disampaikan dalam bentuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Gorontalo 5 tahun periode 2001 – 2006 yang merupakan laporan akhir jabatan Gubernur. Referensi utama dalam penyusunan laporan ini adalah Rencana Strategis (RENSTRA) 2002 – 2004 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2005-2007.

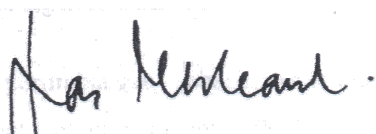
Informasi tingkat keberhasilan atau kinerja (*performance*) Pemerintah Provinsi Gorontalo selama tahun 2001- 2006 diukur berdasarkan pengukuran pencapaian sasaran dan pengukuran kinerja kegiatan berdasarkan RENSTRA dan RPJMD. Selanjutnya untuk menegaskan capaian kinerja tersebut dilakukan *benchmarking* dan analisis terhadap capaian kinerja tersebut.

Diharapkan laporan akuntabilitas kinerja ini dapat menjadi media informasi eksternal publik sekaligus menjadi alat koreksi internal penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Gorontalo. Disadari, berbagai kendala dan tantangan masih mewarnai pelaksanaan tugas serta upaya implementasi wewenang Pemerintah Provinsi Gorontalo kedepan. Namun demikian *the show must go on* karena banyak inspirasi, inovasi serta keinginan dan kemauan yang masih harus diwujudkan di masa yang akan datang. Karenanya mari jadikan tantangan dan hambatan menjadi peluang sebagai *learning process in the future* dan awal keberhasilan di masa datang.

Kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo tahun 2001 - 2006, diucapkan terima kasih.

Gorontalo, Agustus 2006

Gubernur Gorontalo,



Fadel Muhammad